



INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017

Sesuai ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 69 masih mengacu pada PP 38 Tahun 2007 mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka berikut disampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kabupaten Malang Tahun 2017 yang digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Malang Tahun 2017 merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan ruang lingkup pembahasan mencakup Penyelenggaraan Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan Pemerintahan Umum, Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, Tugas Pembantuan serta Tugas Umum Pemerintahan

A. GAMBARAN UMUM DAERAH

A.1. Kondisi Geografis Daerah

Wilayah Kabupaten Malang terletak antara 112°17'10,90" – 112°57'00,00" Bujur Timur, 7°44'55,11" – 8°26'35,45" Lintang Selatan. Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari:

- Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang;
- Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang;
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri;

Bagian Tengah : Kabupaten Malang berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu.

Luas wilayah 353.486 ha. Secara administratif, wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga (RT). Perkembangan penduduk Kabupaten Malang Tahun 2017 menurut data sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada sebesar 2,782,740 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1,403,364 jiwa dan perempuan 1,379,376 jiwa.

A.2. Kondisi Ekonomi

Pada tahun 2017 perekonomian Kabupaten Malang dapat ditunjukkan dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) tahun 2016 sebesar Rp. 81.789.100.000.000,00 dan tahun 2017 diproyeksikan mencapai Rp. 87.040.198.640.000,00. PDRB per kapita Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2016 sebesar Rp. 31.909.457,00 dan tahun 2017 diproyeksikan mencapai Rp. 33.710.000,00. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2016 sebesar 5,3% dan tahun 2017 diproyeksikan mencapai 5,59% dengan tingkat inflasi tahun 2016 sebesar 4,96% dan tahun 2017 diproyeksikan sebesar 3,75%.

Kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan daya beli ditunjukkan dengan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu tahun 2016 sebesar 67,51 dan tahun 2017 diproyeksikan sebesar 67,64.

B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

B.1. Visi dan Misi

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang yang berlandaskan pada sebuah nilai filosofis, yakni: Pertama: Niat untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi dan pembangunan, atau diberi istilah Madep. Kedua: Untuk mewujudkan niat tersebut pemerintah berkomitmen untuk memiliki sikap kedisiplinan, bekerja keras dan produktif dalam melaksanakan pembangunan, atau disebut dengan Manteb. Sedangkan yang Ketiga: Untuk tujuan pembangunan dalam 5 tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan agar setiap

pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, atau diberi istilah Manetep.

Dengan mempertimbangkan tiga landasan filosofis dan pedoman arah pembangunan di atas, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut: "Terwujudnya Kabupaten Malang yang **MADEP MANTEB MANETEP**" Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan". Guna mewujudkan visi tersebut, terdapat misi yang harus ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Misi 1 **Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum**, sasaran yaitu:
 - 1) Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama;
 - 2) Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik;
 - 3) Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah.
- b. Misi 2 **Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi**, sasaran yaitu:
 - 1) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik;
 - 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
 - 3) Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik.
- c. Misi 3 **Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia**, sasaran yaitu:

Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan.
- d. Misi 4 **Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif**, sasaran yaitu:

Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif.

- e. Misi 5 **Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa**, sasaran yaitu:
 - 1) Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa;
 - 2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.
- f. Misi 6 **Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan**, sasaran yaitu:
 - 1) Meningkatnya pelayanan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika;
 - 2) Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar;
 - 3) Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air.
- g. Misi 7 **Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup**, sasaran yaitu:
 - 1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 2) Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif.

B.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Visi "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Madep Manteb Manetep" yang dijabarkan dengan Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan, dan tujuh misi Pemerintah Kabupaten Malang, diwujudkan melalui tiga strategi umum sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kemiskinan;
2. Mengoptimalkan potensi sektor pariwisata;
3. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup.

Ketiga strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang 2016-2021 dengan menegaskan komitmen terhadap pengentasan kemiskinan, meningkatkan potensi pariwisata dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan di Kabupaten Malang.

B.3. Prioritas Pembangunan Tahun 2017

Dengan mengacu pada RKP Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, tema pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2017 adalah: **“Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Agro-Ekowisata dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Upaya Penurunan Kemiskinan”**, dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kemandirian daya saing ekonomi daerah melalui sektor ekonomi yang berbasis pada potensi unggulan dan andalan daerah;
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing perekonomian;
3. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kualitas pelayanan publik;
4. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan;
5. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas pendidikan;
6. Peningkatan upaya-upaya untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan pengangguran;
7. Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal;
8. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana.

C. URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan

Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

C.1. Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

Capaian urusan Pendidikan dapat dituangkan sebagai berikut :

- a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat ditunjukkan pada Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak sebesar 89.920 jiwa sedangkan Jumlah anak usia 4 - 6 tahun sebesar 109,782 sehingga capaian sebesar 99.24%
- b) Penduduk yang berusia 15 tahun keatas melek huruf sebesar 98.88 %;
- c) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang murah, berkualitas dan berkeadilan yang ditandai dengan sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2017 sebesar 99,4%;
- d) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs tahun 2017 sebesar 90.68%.
- e) Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs, ditunjukkan dengan capaian Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs tahun 2017 sebesar 100%.
- f) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs tahun 2017 sebesar 99.60 %.
- g) Kualifikasi atau kompetensi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV tahun 2017 sejumlah 28,524 atau sebesar 96,91% dari Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs sebesar 23,272.

2. Urusan Kesehatan

Capaian urusan kesehatan Tahun 2017 sebagai berikut :

- 1) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2017 sebesar 95.58 %.
- 2) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Tahun 2017 sebesar 97,48 %.
- 3) Persentase Angka Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan tahun 2017 sebesar 100 %.
- 4) Penanganan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA tahun 2017 sebesar 85, 62 % dan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Tahun 2017 sebesar 96.43%.
- 5) Cakupan kunjungan bayi Tahun 2017 sebesar 98, 52%.

- 6) Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin tahun 2017 mencapai 92,01%.

3. Urusan Lingkungan Hidup

Capaian urusan Lingkungan Hidup dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Penyelesaian penegakan hukum lingkungan tahun 2017 dengan capaian 100%;
- 2) Jumlah daya tampung TPS yang tertangani melalui layanan pengangkutan sampah ke TPA, penanganan sampah dengan model Tempat Pengolahan Sampah Terpadu berbasis Reduce, Reuse, Recycle (TPST-3R), serta pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat tahun 2017 sebesar 40.18 %;
- 3) Jumlah seluruh pasar di Kabupaten Malang pada tahun 2017 sudah tergolong baik.

Penghargaan yang dicapai dalam urusan lingkungan hidup antara lain :

- 1) Nirwasita Tantra oleh Presiden Republik Indonesia.
- 2) Anugerah Adipura Kategori Kota Kecil Periode 2016 - 2017 untuk Kota Kepanjen.
- 3) Penghargaan Adiwiyata Nasional kepada SDN 3 Sumberpucung.
- 4) Penghargaan Kampung Pro Iklim (Proklim) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Desa Rejosari, Kecamatan Bantur.

4. Urusan Pekerjaan Umum

Capaian urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

- 1) Jalan kabupaten sepanjang 1.668,76 km secara bertahap kondisinya terus ditingkatkan. Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas tahun 2017 telah ditingkatkan sepanjang 117,20 km, dan untuk mempertahankan kondisi jalan yang ada telah dilaksanakan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 150 km dan pemeliharaan berkala sepanjang 122 km, sehingga jalan kabupaten pada tahun 2017 naik menjadi 1.108,92 km atau 66,45%.
- 2) Di bidang irigasi, panjang saluran irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik tahun 2016 sebesar 621.630,11 m dan tahun 2017 mencapai 637.972,21 m atau meningkat 2,63%. Kecukupan debit air irigasi terhadap luas areal pertanian

sebesar 78,22% atau 66.904,04 liter/detik. Capaian ini telah memenuhi target Standar Pelayanan Minimal yakni sebesar 70% (kategori kinerja baik).

- 3) Jumlah rumah tangga ber sanitasi pada tahun 2017 sebesar 80.55 %
- 4) Ruang Terbuka Hijau persatuan wilayah ber HGB/HPL sebesar 64.27 %

5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

- 1) Jumlah rumah tangga pengguna air bersih sebesar 669,334 atau sebesar 89.19 % dari jumlah seluruh rumah tangga sebesar 741,201
- 2) Jumlah rumah layak huni sebesar 707,792 atau sebesar 97.96 % dari Jumlah seluruh rumah sebesar 722,495.

6. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

- 1) Persentase peningkatan Sarana dan Prasarana Keolahragaan yang berfungsi baik tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.
- 2) Jumlah Lapangan olahraga tahun 2017 sebesar 1.410 dan gelanggang olahraga sebesar 791 buah.

7. Urusan Penanaman Modal

- 1) Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2016 sebesar Rp1.433.171.086.789,00 dengan jumlah investor sebanyak 20 unit dan tahun 2017 nilai investasi sebesar Rp. 2.092.086.508.975,00 dengan jumlah investor sebanyak 24 unit.
- 2) Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2016 sebesar Rp. 6.556.937.158.745,00 dengan jumlah investor sebanyak 20 unit dan tahun 2017 nilai investasi sebesar Rp. 22.004.497.258.950,00 dengan jumlah investor sebanyak 7.521 unit.
- 3) Penyerapan tenaga kerja dari PMA maupun PMDN tahun 2016 sebanyak 26.192 orang dan tahun 2017 sebanyak 77.862 orang.

8. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Capaian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diuraikan sebagai berikut :

- 1) Perkembangan koperasi ditandai dengan jumlah koperasi pada tahun 2017 menjadi 1.273 unit dengan anggota koperasi sebanyak 275.847 orang.
- 2) Jumlah usaha mikro kecil dan menengah tahun 2016 sebesar 419.860 unit dan tahun 2017 mencapai 420.995 unit atau naik 0,4% dengan omzet tahun 2016 sebesar Rp. 41.853.553.300.000,00 dan tahun 2017 sebesar Rp. 48.944.650.000.000,00 atau naik 16,94%. Pada tahun 2016, UMKM menyerap tenaga kerja sebanyak 1.299.421 orang dan tahun 2017 sebanyak 1.378.738 orang atau naik 6,1%.

9. Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diuraikan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilaksanakan mekanisme jemput bola di 33 kecamatan serta penyederhanaan prosedur dan mengutamakan kecepatan pelayanan melalui teknologi infomatika dengan menerapkan sistem kependudukan berbasis perekaman biometrik Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Jumlah penduduk yang memiliki KTP Tahun 2017 sebanyak 1,886,384 orang.
- 2) Untuk pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) tahun 2017 sebanyak 810.913 KK. Untuk penerbitan kutipan akta kelahiran tahun 2017 sebanyak 1,840.177 kutipan

10. Urusan Ketenagakerjaan

Capaian urusan Ketenagakerjaan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencapai 96,83% dimana jumlah angkatan kerja sebanyak 1.643.830 orang sedangkan penduduk usia kerja sebanyak 1.697.536 orang.
- 2) Tingkat pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan tahun 2017 sebanyak 4.788 dan pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 3.254 orang.
- 3) Salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran adalah melalui peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan kerja, jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat tahun 2016 sebanyak 88 orang dan tahun 2017 sebanyak 264 orang atau naik 200% dan pelatihan berbasis kewirausahaan tahun 2016 sebanyak 120 orang dan tahun 2017 sebanyak 118 orang atau turun 1,67%.

- 4) Jumlah kepesertaan jaminan Sosial bgi pekerja di Kabupaten Malang

11. Urusan Pangan

Capaian urusan Pangan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan Pangan Utama (beras) tahun 2017 mencapai 910.56 ton.
- 2) Tersedianya regulasi tentang ketahanan pangan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Malang nomor 27 Tahun 2012 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

12. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- 1) Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2017 sebesar 11.502 orang
- 2) Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas sebesar 88.12 %.
- 3) Presentase Partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 93.54 %

13. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Capaian Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah :

- 1) Upaya peningkatan kualitas keluarga yang dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana, Pasangan Usia Subur (PUS) terus mengalami penyesuaian seiring dengan dinamika jumlah penduduk. Pasangan Usia Subur tahun 2017 sebanyak 519.379 pasangan. Sedangkan Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB tahun 2017 sebesar 393.379.
- 2) Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) mandiri yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB di tingkat desa/kelurahan tahun 2017 sebanyak 151 orang.
- 3) Ratio petugas lapangan KB/Penyuluh KB pada Desa/Kelurahan sebesar 3.94%.

14. Perhubungan

Capaian Urusan Perhubungan Sebagai berikut :

- 1) Dalam upaya meningkatkan kelancaran dan keselamatan arus barang dan jasa serta mobilitas orang, maka selain dilakukan pembangunan ataupun perbaikan terhadap

prasarana jalan, juga dilakukan upaya menciptakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Upaya dimaksud melalui uji kendaraan bermotor dengan peralatan pengujian yang lulus kalibrasi sesuai ambang batas toleransi penyimpangan pengukuran masing-masing alat. Tahun 2016 tercatat 51.810 kendaraan wajib yang lulus uji dan tahun 2017 sebanyak 50.694 kendaraan wajib yang lulus uji atau turun sebesar 2,15% disebabkan mutasi kendaraan, uji kendaraan diluar daerah, beralihnya fungsi kendaraan wajib uji menjadi kendaraan pribadi dan usia kendaraan yang sudah tidak layak operasi sehingga tidak lagi diujikan.

- 2) Piala Anugerah Wahana Tata Nugraha dari Presiden Republik Indonesia Kategori Lalu Lintas Kota Sedang (Kota Kepanjen) pada Pemerintah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dari Kementerian Perhubungan.

15. Komunikasi dan Informatika

Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika

- 1) Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat dan Telecenter tahun 2017 dan tahun 2016 sebanyak 12% atau 4 Telecenter.
- 2) Persentase Informasi terpublish di website SKPD dan Pemerintahan Desa mencapai 100%.
- 3) Persentase jaringan terpasang internet di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang dan Kantor Desa mencapai 100% dari 378 desa se-Kabupaten Malang.
- 4) Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2017 dari PR Majalah Indonesia kepada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

16. Pertanahan

Pelaksanaan urusan oleh Dinas Pertanahan. Adapun capaian Urusan Pertanahan sebagai berikut :

- 1) Luas lahan bersertifikat pada tahun 2017 sebanyak 8,266,287 dengan capaian sebesar 75.67 %.
- 2) Meningkatnya pemahaman tentang hukum pertanahan tahun 2017 pada 400 aparatur dan tahun 2016 pada 423 aparatur.
- 3) Penanganan dan fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan tahun 2017 sebanyak 100 %.

17. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelaksanaan urusan tersebar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kecamatan Pagelaran. Adapun capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai berikut :

Indikator	Rumus	Data	Capaian
PKK aktif	Jumlah PKK aktif	423.00	100.00
	Jumlah PKK	423.00	
Posyandu	Jumlah Posyandu aktif	2,837.00	100.00
	Total Posyandu	2,837.00	

18. Sosial

Pelaksanaan urusan tersebar pada Dinas Sosial, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan Kecamatan Kepanjen. Adapun capaian Urusan Sosial sebagai berikut :

Indikator	Rumus	Data	Capaian
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi,	454	454.00
Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental,serta lanjut usia yg tdk potensial yg telah menerima jaminan sosial	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yg telah menerima jaminan sosial	12,629	83.06
	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial	15,205	
PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	265,505	92.68
	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	286,482	

19. Kebudayaan

Pelaksanaan urusan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk pengembangan wisata sejarah budaya dilakukan melalui promosi kekayaan sejarah dan budaya serta pembinaan seni budaya lokal yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa agar dapat dinikmati oleh para wisatawan dalam dan luar negeri. tahun 2017 tercatat 17 buah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan yaitu: Candi Singosari, Arca Dwarapala, Petirtaan Watu Gede, Trupa Sumber Awan, Candi Jago (Jajaghu), Candi Kidal, Arca Ganesha (Situs Batu Bertumpuk), Candi Sapto, Candi Jawar, Candi Badut, Situs Watu Gilang, Makam Kuno Ngabab, Candi Gunung Telih, Candi Bocok, Prasasti Mpu Sendok, Candi Karang Besuki, Candi Songgoriti, Keris Purbakala dan Sisa-sisa Struktur Jembatan Purbakala. 17 buah cagar budaya

tersebut terus dikelola secara terpadu dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal tahun 2017 sebesar 81,82% meningkat dari tahun 2016 sebesar 40%.

20. Statistik

Pelaksanaan urusan tersebar pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Tersedianya informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat berupa buku Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) dan data statistik berupa laju pertumbuhan perekonomian baik secara menyeluruh maupun sektoral, serta tingkat kemakmuran melalui data pendapatan per kapita, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan bahan perencanaan pembangunan baik jangka pendek maupun menengah, bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

21. Perpustakaan

Pelaksanaan urusan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Capaian Urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

Indikator	Rumus	Data	Capaian
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	150,406.00	83.46
	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	180,221.00	
Pengunjung perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	41,478.00	91.16
	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani (10-58)	45,500.00	

22. Kearsipan

Pelaksanaan urusan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah. Capaian Urusan Kearsipan. Capaian urusan kearsipan adalah Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku arsip secara baik mencapai 100% serta Persentase kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan sebanyak 35 kali.

Prestasi urusan kearsipan adalah mendapatkan Juara III Innovative Government Award Tahun 2017 dari Menteri Dalam Negeri.

C.2. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan urusan pada Dinas Perikanan. Capaian Urusan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

Indikator	Rumus	Data	Capaian
Produksi perikanan	Jumlah Produksi ikan (ton)	31,127.14	105.89
	Target Produksi Ikan Daerah (ton)	29,395.10	
Konsumsi ikan	Jumlah Konsumsi Ikan (kg)	2,650.00	100.04
	Target Konsumsi Ikan Daerah (kg)	2,649.00	

2. Pariwisata

Pelaksanaan urusan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pengembangan sektor pariwisata telah dikembangkan destinasi agro-ekowisata, wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Upaya tersebut menarik banyak wisatawan yang ditunjukkan dengan kunjungan wisatawan pada tahun 2016 sebanyak 5.849.544 orang terdiri dari 5.719.881 orang wisatawan nusantara dan 129.663 orang wisatawan mancanegara. Tahun 2017 sebanyak 6.504.360 orang atau naik 11 % terdiri dari 6.395.875 orang wisatawan nusantara dengan rata-rata lama tinggal 2 hari dan 108.485 orang wisatawan mancanegara.

Prestasi Kabupaten Malang untuk urusan pariwisata adalah : 1). 13 Besar Desa Wisata Tingkat Nasional dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia; 2). 5 Besar Pengelola Home Stay terbaik Tingkat Nasional mewakili Indonesia di ajang ATF-award Tourism Forum Singapura dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia; 3). Penghargaan tingkat nasional Kabupaten Potensial untuk Kategori Pariwisata dari Frontier; 4). Pemenang Stand Terbaik III dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

3. Pertanian

Pelaksanaan urusan tersebar pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Bagian Administrasi Sumber Daya Alam. Capaian Urusan Pertanian adalah sebagai berikut :

Indikator	Rumus	Data	Capaian
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)	493,793.00	6.94
	Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	71,172.00	
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2016	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pertanian	12,577.04	0.15
	Jumlah total PDRB	81,788.68	

Prestasi untuk urusan pertanian adalah : 1). Juara 1 Penyaji Terbaik Sistem Pengendalian Intern Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Lingkup Kementerian Pertanian dalam Forum Nasional dari Kementerian Pertanian RI; 2). Juara 1 abdi bakti tani sebagai unit kerja pelayanan publik berprestasi percontohan dari dari Kementerian Pertanian RI; 3). Sebagai Kabupaten Pelaksana Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) Berprestasi dari Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian/Pengarah Penas.

4. Perdagangan

Pelaksanaan urusan tersebar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ciptakarya, serta Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah. Capaian perkembangan perdagangan dalam negeri dapat dilihat dari jumlah Perusahaan yang mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada tahun 2016 sebanyak 22.989 perusahaan dan tahun 2017 secara kumulatif menjadi sebanyak 23.694 perusahaan atau naik 3,07%.

Selain itu capaian perkembangan perdagangan luar negeri dapat dilihat dari Neraca Ekspor Impor. Realisasi ekspor non migas tahun 2016 sebesar US\$377.153.816,14 dan tahun 2017 menjadi US\$388.442.850,00 atau naik 2,99 % dan realisasi impor non migas tahun 2016 sebesar US\$93.323.638,27 dan tahun 2017 menjadi US\$94.392.903,97 atau naik 1,15%.

5. Perindustrian

Pelaksanaan urusan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Perekonomian serta Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. Capaian Urusan Perindustrian adalah sebagai berikut

- 1) Perkembangan sektor industri dengan jumlah industri formal pada tahun 2017 sebesar 21.365 unit usaha.
- 2) Nilai investasi di sektor industri formal tahun 2017 sebesar Rp2.817.999.895.000,00. Nilai investasi di sektor industri informal/rumah tahun 2017 sebesar Rp19.564.330.000,00.

6. Transmigrasi

Pelaksanaan urusan pada Dinas Tenaga Kerja. Terwujudnya kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, serta dapat diperolehnya daerah penempatan transmigrasi yang layak dan sesuai dimana penempatan transmigran tahun 2017 sebanyak 3 KK dan tahun 2016 sebanyak 15 KK. Untuk meningkatkan keterampilan calon transmigran dilakukan melalui pelatihan transmigrasi lokal tahun 2017 sebanyak 30 KK dan tahun 2016 sebanyak 46 KK.

C.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Pelaksanaan urusan tersebar pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ciptakarya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Bagian Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah, serta Kecamatan. Capaian Fungsi Penunjang Perencanaan adalah :

- 1) Persentase Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan kualitas yang baik mencapai 100%.
- 2) Persentase program kegiatan perangkat daerah yang mencapai 98,99%.
- 3) Persentase hasil program prioritas dengan nilai capaian minimal "80%", mencapai 100%.

2. Keuangan

Pelaksanaan urusan tersebar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Bagian Administrasi Perekonomian serta Kecamatan.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang. Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan Keuangan, Laporan Inventaris BMD Perangkat Daerah, pemanfaatan penghapusan dan pemindahtanganan BMD sesuai ketentuan mencapai 100 %.

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan urusan tersebar pada Badan Kepegawaian Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Capaian Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut :

- 1) Persentase aparatur yang telah lulus diklat teknis dan fungsional dengan kriteria baik tahun 2017 sebesar 100%.
- 2) Persentase tingkat kompetensi aparatur tahun 2017 mencapai 98,92%.
- 3) Jumlah ASN yang lulus diklat kepemimpinan dengan kategori memuaskan tahun 2017 sebanyak 89 orang.
- 4) Jumlah ASN yang memiliki kompetensi (jabatan, pangkat, pendidikan, diklat) tahun 2017 sebanyak 396 orang.

4. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan urusan dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan. Capaian Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan ditunjukkan dengan Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Kabupaten Malang sebesar 100% dan Persentase kajian yang ditindaklanjuti mencapai 100%.

5. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Fungsi lain)

Pelaksanaan urusan tersebar pada Inspektorat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat DPRD, Bagian Administrasi Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah serta Kecamatan Kepanjen.

Capaian dalam urusan ini dibuktikan dengan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selama 3 tahun berturut-turut. Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2016 dengan nilai 62,24 predikat B dan tahun 2017 meningkat mencapai nilai 70,52 dengan predikat BB terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

C.4. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa Politik, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat)

Pelaksanaan urusan tersebar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, serta 33 Kecamatan. Capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah mencapai 76,29%, tahun 2017 dilakukan penanganan tindak pidana ringan dan pembongkaran sebanyak 4484 kasus.
- 2) Persentase Gangguan Trantibum yang diselesaikan sebesar 100%, tahun 2017 dilakukan penanganan 4484 gangguan.
- 3) Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran mencapai 100%, tahun 2017 dilakukan penanganan 35 kasus kebakaran.
- 4) Persentase penurunan angka potensi konflik ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam), batas wilayah dan SARA mencapai 100%.
- 5) Persentase pencegahan dini potensi konflik sebesar 100%.
- 6) Persentase Penanganan Darurat Bencana mencapai 100%, pada tahun 2016 dilaksanakan penanganan 56 bencana dan tahun 2017 71 bencana;
- 7) Lomba Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dari Gubernur Jawa Timur, an. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang.

D. PENUTUP

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Malang Tahun 2017 dengan hasil yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan pondasi yang kuat. Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang

Guna menyempurnakan dan memperbaiki pelaporan pencapaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Malang, sangat mengharapkan adanya / peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas - tugas dalam bentuk partisipasi stakeholders, yaitu Perangkat Daerah (PD), instansi pemerintah pusat di

daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat sehingga dalam pengambilan kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Daerah.

Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang maupun Pemerintah Provinsi dan Pusat serta penyelarasan dengan Program Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan sebagai bahan Perumusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan Kabupaten Malang di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP.